

## PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKURAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Gladys Dwika Aprilia<sup>1</sup>, Puja Rizky Ramadhan<sup>2</sup>, Hanafi<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: [gladysdwika26@gmail.com](mailto:gladysdwika26@gmail.com)

---

### Article History

Received: 24-04-2025

Revision: 07-05-2025

Accepted: 13-05-2025

Published: 17-05-2025

**Abstract.** The study aims to determine the effect of the implementation of accrual-based accounting and internal control systems on the accountability of performance in government institutions at the State Asset Management Agency. The type of research used is associative research method with the help of SPSS version 19. This study employs multiple linear regression analysis. The sample in this study consists of 92 respondents. Primary data collection was conducted using a questionnaire. The research results indicate that accounting standards have a positive and significant partial effect on the accountability of government performance in the State Asset Management Agency. The test results show a t-count value of  $4.554 > t\text{-table value of } 1.98$  with a significance value of  $0.000 < 0.05$ , therefore, hypothesis H2 is accepted and H0 is rejected, meaning that the internal control system has a positive and significant partial effect on the accountability of government performance in the State Asset Management Agency. The research results show that accrual-based accounting and internal control systems have a positive and significant effect on performance accountability with an F-count value of 16.521, which is greater than 3.10, and a significance value of 0.000 which is less than 0.05.

**Keywords:** Accrual Based Accounting and Internal Control System and Performance Accountability

**Abstrak.** Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan bantuan program SPSS versi 19. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 92 responden. Pengambilan data primer menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Hasil pengujian menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,554 > t_{tabel}$  sebesar 1,98 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka hipotesis H<sub>2</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak, artinya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai dari F hitung sebesar 16,521 yang lebih besar dari 3,10 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

**Kata Kunci:** Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Kinerja

---

**How to Cite:** Aprilia, G. D., Ramadhan, P. R., & Hanafi. (2025). Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akural dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (3), 3063-3076. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3037>

---

## **PENDAHULUAN**

Upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanahkan agar seluruh pemerintah Indonesia menyusun laporan anggaran dan laporan keuangan berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang pencatatannya menggunakan basis akrual, akan mengakui pendapatan, beban, asset, hutang, dan ekuitas di dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Manfaat dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diperoleh ini yaitu, mempermudah tugas pemerintah di dalam mengevaluasi pada laporan keuangan, sekaligus pada kinerja pemerintah, terutama terhadap sumber daya manusia (SDM) (Pangemanan, S., & Pinatik, 2015). Basis akrual adalah konsep pengakuan akuntansi yang didasarkan pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi tanpa memperhatikan saat terjadinya aliran kas masuk atau aliran kas keluar dari transaksi tersebut. Dengan kata lain, dalam basis akrual suatu transaksi atau peristiwa ekonomi yang terjadi sudah dicatat meskipun transaksi tersebut baru memiliki implikasi penerimaan kas atau pengeluaran kas di masa yang akan datang.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut setiap entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menerapkan SAP Berbasis Akreal dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, semua pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP PP nI 7 Tahun 2010. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akreal dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akreal paling lambat Tahun Anggaran 2015. Selain mengatur SAP Berbasis Akreal, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akreal yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas. Tujuan utama penerapan SAP Berbasis Akreal pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Selanjutnya, peningkatan kualitas informasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) bagi para pemangku kepentingan entitas pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta membuat berbagai keputusan terhadap suatu entitas pemerintah daerah.

Dari segi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan lebih akuntabel apabila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Hal itu disebabkan karena dalam akuntansi berbasis akrual seluruh beban yang terjadi baik yang sudah dibayar maupun belum dibayar dicatat dan diakui. Dengan demikian akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan perhitungan biaya pelayanan publik yang lebih wajar. Pada sisi yang lain, akuntansi berbasis akrual juga dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik. Hal itu disebabkan karena akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan informasi tentang penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya serta menyajikan pengungkapan kewajiban di masa yang akan datang (KSAP, 2006).

Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dikarenakan banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah menerbitkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berupa prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah diharapkan laporan akuntansi yang disusun oleh entitas-entitas atau badan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dapat mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang nantinya akan dijadikan sebagai faktor penentu kebijakan keuangan dan alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi yaitu melalui sistem pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Aset tetap negara merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Pada umumnya nilai aset tetap negara paling besar dibandingkan akun lain pada Laporan Keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, manajemen aset negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan aset tetap negara harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Manajemen Aset Negara yang merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Lembaga Manajemen Aset Negara

berperan dalam hal memberikan pelayanan pengelolaan aset (khususnya properti) kepada publik baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas secara cepat, tepat, optimal, dan akuntabel; meningkatkan status aset (fisik dan legal) guna menambah nilai aset. Maksimalisasi PNBPN melalui pemanfaatan aset dan membantu pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data pada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa ada beberapa permasalahan terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual yaitu tidak dilakukannya penyusunan laporan keuangan secara komperhensif sehingga menyebabkan terjadinya (1) Pencatatan aset yang tidak akurat (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset yang belum dioptimalkan (*underutilized*); (5) Standard operating prosedur (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan. Persoalan aset negara termasuk salah satu permasalahan bangsa yang serius dan perlu segera ditangani. Ketidakjelasan dalam pengelolaan aset negara menyebabkan apa yang disebut dengan *information asymmetry* atau kesenjangan informasi. Kondisi ini mengakibatkan para Menteri, terutama Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara, atau Pimpinan Lembaga tidak mengetahui jumlah, lokasi, dan status asetnya.

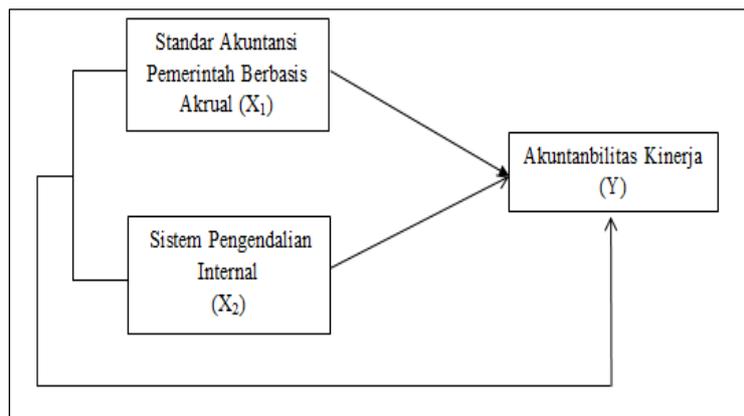
Hal tersebut mengakibatkan dua hal yaitu timbulnya *adverse selection problem* atau pengambilan keputusan yang tidak optimal dan moral hazard atau perlakuan yang menyimpang. ([www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)). Jika dicermati, penyalahgunaan aset milik negara terjadi hampir di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan pelaku yang beragam mulai dari pegawai dan pejabat yang masih aktif hingga non aktif bahkan sampai sekelas menteri. Apabila diamati, kejadian ini telah berlangsung selama puluhan tahun bahkan bisa dikatakan sejak zaman Indonesia merdeka. Jenis penyalahgunaannya pun beragam mulai dari dimiliki untuk kepentingan pribadi, disewakan ke pihak ketiga secara ilegal, bahkan ada yang dijual. Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

Maraknya kasus korupsi terkait aset tetap negara menunjukkan sistem pengendalian internnya masih lemah. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengendalian intern yang andal hingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau

hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Seluruh komponen SPI pemerintah (menurut PP No. 60 Tahun 2008) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai. Kurang efektifnya peran dari Lembaga Manajemen Aset Negara dalam proses pengawasan terhadap berbagai lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam menjaga aset negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi akuntansi berbasis akural dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2019), yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap sample dan populasi penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif/bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN di Lembaga Manajemen Aset Negara sebanyak 119 pegawai. Menurut Sugiyono (2019) jika jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka jumlah sampelnya dapat menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel menjadi 92 orang



## Hipotesis Penelitian

- Akuntansi berbasis akural berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
- Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
- Akuntansi berbasis akural dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

## HASIL

### Uji Validitas

Menurut (Sugiono, 2019) “Jika data yang dikumpulkan dan informasi yang ditemukan dalam artikel yang diteliti ada kemiripan, maka temuan penelitian tersebut sah”.

**Tabel 1.** Uji validitas data

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item Corelation	r- mean	Hasil
Standar Akuntansi Berbasis Akrual (X <sub>1</sub> )	X <sub>1.1</sub>	0.409	0,3	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0.581		Valid
	X <sub>1.3</sub>	0.494		Valid
	X <sub>1.4</sub>	0.499		Valid
	X <sub>1.5</sub>	0.514		Valid
	X <sub>1.6</sub>	0.644		Valid
	X <sub>1.7</sub>	0.499		Valid
	X <sub>1.8</sub>	0.614		Valid
Sistem Pengandian Internal (X <sub>2</sub> )	X <sub>2.1</sub>	0.449	0,3	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0.551		Valid
	X <sub>2.3</sub>	0.436		Valid
	X <sub>2.4</sub>	0.549		Valid
	X <sub>2.5</sub>	0.652		Valid
	X <sub>2.6</sub>	0.512		Valid
	X <sub>2.7</sub>	0.485		Valid
	X <sub>2.8</sub>	0.517		Valid
	X <sub>2.9</sub>	0.434		Valid
	X <sub>2.10</sub>	0.357		Valid
Akuntabilitas Kinerja (Y)	Y.1	0.351	0,3	Valid
	Y.2	0.364		Valid
	Y..3	0.696		Valid
	Y.4	0.725		Valid
	Y..5	0.707		Valid
	Y.6	0.658		Valid
	Y.7	0.636		Valid
	Y.8	0.501		Valid

Data yang dikumpulkan melalui angket harus diuji agar hasil penelitian dapat merepresentasikan hasil penelitian secara objektif. Pengujian data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan melakukan uji validitas dengan mengacu pada nilai cronbach's alpha yang tidak boleh kurang dari 0,3 maka data layak dianalisis.

### Uji Reliabilitas (Kehandalan)

Uji ini dimaksudkan guna mengukur konsistensi internal dari sebuah instrumen pengukuran data yang diteliti.

**Tabel 2.** Hasil uji reliabilitas

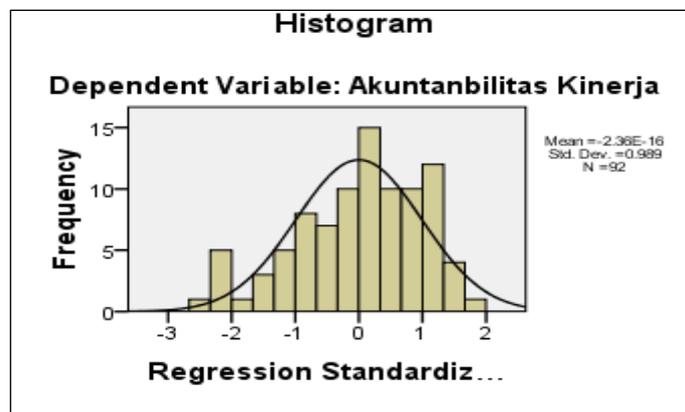
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Standar Akuntansi Berbasis Akreal (X <sub>1</sub> )	0,809	8
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	0.812	10
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,842	8

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Melihat hasil keluaran SPSS dapat dilihat bahwasanya nilai Cronbach’s Alpha setiap variabel besarnya melebihi (>0,60). Dengan demikian, diasumsikan bahwasanya pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat diandalkan atau diharapkan dapat diandalkan.

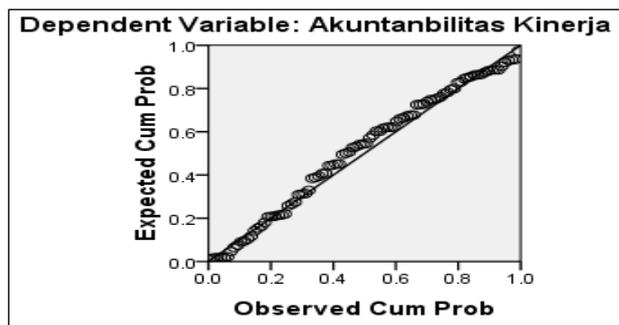
**Uji Normalitas**

Uji ini dimaksudkan guna menguji dan memastikan data yang diteliti telah terdistribusi secara normal sehingga layak sebagai data yang dianalisis.



**Gambar 2.** Uji Histogram

Gambar 2 ialah temuan uji asumsi histogram menunjukkan bahwa informasi tersebut tersebar secara teratur, yang mana gambar histogramnya mempunyai garis yang membengkok lonceng dan terdapat cembung yang cukup di tengahnya.



**Gambar 3.** Uji PP Plot

Gambar 3 ialah hasil uji normalitas data dengan mempergunakan PP Plot, cenderung terlihat fokus informasi tersebar dari sudut ke sudut sehingga informasi tersebut beredar.

**Tabel 3.** Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		<b>Unstandardized Residual</b>
N		92
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.73749258
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.052
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.682
Asymp. Sig. (2-tailed)		.741

Lihat uji tes Kolmogrov Smirnov, nilai Asymp sig menunjukkan 0,741 yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya informasi disampaikan secara teratur, dimana nilainya melebihi 0.05 ( $p= 0.741 > 0.05$ ).

**Uji Multikolineritas**

Uji ini dalam model regresi dimaksudkan guna mendeteksi ada atau tidak hubungan linear yang kuat antar variabel independen (prediktor).

**Tabel 4.** Hasil uji multikolineritas

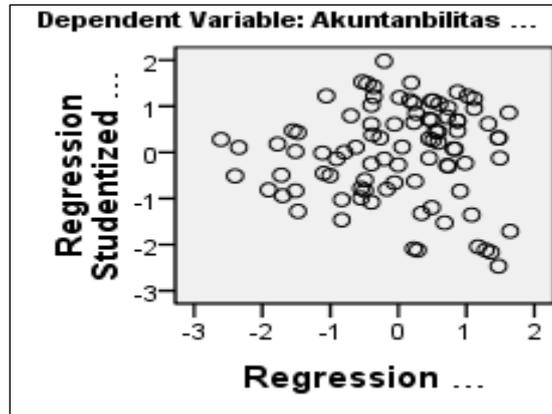
<b>Model</b>	<b>Collinearity Statistics</b>	
	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
Standar Akuntansi Berbasis Akrua (X <sub>1</sub> )	.998	1,002
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	.998	1,002

*Sumber Output SPSS 25 (2025)*

Berdasarkan informasi pada tabel 8, terlihat bahwa nilai ketahanan semua faktor otonom adalah seperti nilai yang telah ditentukan, yakni 0,1, dan nilai VIF dari semua faktor bebas ialah seperti nilai yang telah ditentukan, yakni 10, jadi tidak terjadi multikolineritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini ditujukan guna melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi.



**Gambar 4.** Uji Heterokedesitas

Gambar 4 memperlihatkan bahwasanya fokus berikutnya tersebar sembarangan dan tidak membingkai contoh atau garis pola tertentu. Hasil ini menyatakan bahwasanya model relaps ini terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

**Regresi Linear Berganda**

Regresi linier berganda ialah metode analisis statistik yang ditujukan guna meneliti korelasi antar satu variabel dependen (terikat) dengan dua atau lebih variabel independen (bebas).

**Tabel 5.** Regresi linier berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	4.116	4.297	
	Standar Akuntansi Berbasis AkruaI (X <sub>1</sub> )	0.327	0.098	0.301
	Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	0.382	0.084	0.413

Berlandaskan Tabel 9, berikut adalah persamaan Regresi Linear Berganda yang dirumuskan:

$$Y = 4,116 + 0,327 X_1 + 0,382 X_2$$

Nilai konstan sebesar 4,116 artinya nilai akuntabilitas kinerja sebesar 4,116 dengan nilai korelasi antara standar akuntansi berbasis akrual dengan akuntabilitas kinerja yakni 0,327 dan nilai korelasi antara variabel sistem pengendalian internal dengan nilai akuntabilitas kinerja yakni 0,382. Korelasi atau pengaruh yang paling dominan yaitu pada variabel sistem pengendalian internal.

**Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)**

Uji ini ditujukan guna menilai signifikansi pengaruh setiap variabel independen (prediktor) terhadap variabel dependen secara individual dalam model regresi

**Tabel 6.** Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.116	4.297		0.958	0.341
Standar Akuntansi Berbasis AkruaI (X <sub>1</sub> )	0.327	0.098	0.301	3.324	0.001
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	0.382	0.084	0.413	4.554	0.000

- Hasil pengujian untuk variabel standar akuntansi berbasis akrual menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,324 > t_{tabel}$  sebesar 1,98 dengan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ , maka hipotesis  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya bahwa standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
- Hasil pengujian untuk variabel sistem pengendalian internal menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,554 > t_{tabel}$  sebesar 1,98 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka hipotesis  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
- 

**Uji F**

**Tabel 7.** Hasil uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	758.263	2	379.132	16.521	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2042.389	89	22.948		
	Total	2800.652	91			

Uji hipotesis simultan atau uji F membuktikan bahwa nilai dari F hitung sebesar 16,521 yang lebih besar dari 3,10 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima dan hipotesis 0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

### Uji R<sup>2</sup> (Determinasi)

Ukuran seberapa cocok (*goodness of fit*) garis regresi dengan data disebut koefisien determinasi atau yang sering dikenal dengan R-squared atau R<sup>2</sup>. Dalam model regresi, besarnya variabel independen dapat menerangkan varians variabel dependen dapat ditunjukkan oleh koefisien determinasi.

**Tabel 8.** Hasil uji koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 <sup>a</sup>	.271	.254	4,790

Tabel 8 memperlihatkan nilai *adjusted R Square* 0,254 yang berarti variabel disiplin kerja dapat akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal dapat menjelaskan akuntabilitas kinerja sebesar 25,4%. Sedangkan, 74.6% diuraikan oleh variabel lainnya yang tidak diikutsertakan di penelitian ini.

## DISKUSI

### Pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari uji hipotesis dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,324 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,98 dengan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ , maka hipotesis H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak, artinya bahwa standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Arah positif menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dengan kata lain ketika ada peningkatan akuntansi berbasis akrual dengan indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian (Riyani dan Widajantie, 2022) yang menyatakan standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

### **Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari uji hipotesis dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,554 > t_{tabel}$  sebesar  $1,98$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka hipotesis  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Arah positif menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dengan kata lain ketika ada peningkatan akuntansi berbasis sistem pengendalian internal dengan indikator lingkungan pengendalian, tujuan entitas dan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan aktivitas akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Puturani, 2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

### **Pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari uji hipotesis dengan nilai dari  $F$  hitung sebesar  $16,521$  yang lebih besar dari  $3,10$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000$  lebih kecil dari  $0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima dan hipotesis 0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Arah positif menggambarkan bahwasanya implementasi standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Temuan penelitian ini selaras dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara

## **KESIMPULAN**

- Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
- Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
- Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara

## **REKOMENDASI**

- Lembaga Manajemen Aset Negara menyelenggarakan pelatihan kepada pegawai agar memahami prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual dengan menyelenggarakan workshop berkala untuk memperbarui pengetahuan pegawai tentang perubahan regulasi dan praktik terbaik. Pilih perangkat lunak akuntansi yang mendukung akuntansi berbasis akrual dan sesuai dengan kebutuhan lembaga manajemen aset negara agar proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien.
- Lembaga Manajemen Aset Negara menyelenggarakan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk meminimalkan kesalahan dan penipuan dengan melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi. Tetapkan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas operasional dan pengendalian internal dengan melakukan pemantauan secara rutin dan audit harus mencakup pemeriksaan terhadap kepatuhan, keakuratan laporan keuangan, dan efisiensi operasional.

- Lembaga Manajemen Aset Negara harus dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan aset. Libatkan auditor eksternal untuk memberikan perspektif independen dan objektif. Libatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam pengawasan pengelolaan aset negara

## REFERENSI

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afiyah, Nunuy Nur. 2016. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana: Jakarta.
- Dwi Martani. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ihyaul Ulum, 2017. *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi. Edisi ke-3*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 65144.
- Logos. (2017) *Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi)*.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Ssektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Manullang, S. B., & Abdullah, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal , Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 4No. 1*, 62–73.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moh Mahsun, Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mulyadi. (2019). *Akuntansi Manajemen Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat
- Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Putra, I Made Yoga Darma, DKK, 2019, “ Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa”, *EJurnal Akuntansi*, Vol 28, ISSN 2302-8556
- Puturani (2020). Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Bpjs Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas
- Rahmi, R. A., Supriyanto, T., & Nugrahaeni, S. (2022). Analisis Faktor Pengaruh Minat Berinvestasi Generasi Z pada Reksadana Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–14.
- Riyani dan Widajantie (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ,Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010